

## **Ikhwal Sekelumit Menata Kehidupan Masyarakat**

Pemimpin, di bidang apa saja, mulai dari yang berskala kecil hingga berskala besar, seperti kepala keluarga, lurah dan bahkan sampai Kepala Negara menghendaki agar bawahan dan masyarakat yang dipimpinnya menjadi baik. Para bawahan selalu melakukan sebagaimana yang dikehendaki. Pemimpin perusahaan misalnya, selalu menghendaki agar para pegawainya bekerja maksimal sesuai dengan bidangnya sehingga menghasilkan produk sebanyak dan sebaik mungkin. Pemimpin kampus, sebagai seorang rektor berkeinginan agar seluruh dosen dan karyawan dan demikian pula seluruh mahasiswanya melakukan peran-peran maksimal agar diperoleh prestasi sebaik mungkin. Begitu juga kepala pemerintahan, mulai dari lurah, camat, bupati/walikota, gubernur sampai presiden berkeinginan agar para pejabat di bawahnya menjalankan pelayanan masyarakat sebaik-baiknya. Begitu pula rakyat yang dipimpinnya, agar menjadi baik, hidup damai, saling mengenal dan mengasihi, produktif dan berkualitas hidupnya.

Persoalannya adalah bagaimana memenuhi keinginan itu, ternyata tidak mudah. Persoalan yang selalu muncul di pikiran para pemimpin adalah bagaimana membuat agar para bawahan dan juga masyarakat, menjalankan peran-peran mereka secara maksimal dan tidak saling mengganggu di antara sesama dan bahkan sebisa-bisa saling membantu dan sehingga saling menguntungkan. Yang selalu dipikirkan adalah bagaimana kehidupan menjadi dinamis, tetapi selalu tetap utuh dan berhasil meraih prestasi masing-masing. Ada yang berpendapat bahwa agar terjadi ketertiban, harus ditegakkan supremasi hukum. Maka, dibuatlah peraturan dan perundang-undangan, yang diberlakukan bagi seluruh anggota masyarakat. Diusahakan agar tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Siapa pun yang salah harus dihukum. Hukum harus ditegakkan, tidak boleh pandang bulu. Lurah, camat, bupati, gubernur, menteri sampai presiden jika melakukan kesalahan harus diadili, dan jika melanggar peraturan harus ikhlas masuk bui.

Logika berpikir seperti itu terasa seperti benar. Sebab, dengan cara berpikir seperti itu, tidak akan ada orang yang berani melakukan pelanggaran. Jika ada pelanggaran, maka akan segera diadili dan dimasukkan ke penjara. Akibat pemberlakuan hukum seperti itu, siapapun akan berpikir seribu kali untuk melakukan pelanggaran. Hanya persoalannya, tidak semua penyimpangan dapat diketahui dengan mudah. Orang dengan kecerdasannya akan dapat mengetahui celah-celah peraturan yang menyelamatkandiri dari tuduhan berbuat salah. Selain itu ternyata dengan kecerdasannya pula, seseorang bisa bekerjasama dengan pihak keamanan, polisi, jaksa, hakim dan bahkan dengan pemegang kekuasaan. Tidak percaya, faktanya berbicara seperti itu. Polisi lalu lintas misalnya, bekerjasama dengan sopir yang melanggar peraturan lalu lintas, maka cukup berjabat tangan dengan menyeseipkan selempang uang di bawah telapak tangannya, maka sopir segera dilepas tanpa melalui proses pengadilan. Seorang polisi hutan, bekerjasama dengan pencuri kayu yang berada di bawah kewenangannya. Petugas yang semestinya menjaga hutan malah berperan sebaliknya, menjaga pencuri agar berhasil mendapatkan kayu sebanyak-banyaknya. Masing-masing mendapat untung. Contoh-contoh lain, sedemikian banyak terjadi di masyarakat di berbagai bidang kehidupan.

Demikian pula di pengadilan. Ada istilah mafia peradilan, jual beli perkara dan lain-lain. Bahkan istilah baku dalam peradilan dipelesetkan sedemikian rupa untuk menyindir, bagaimana sesungguhnya dunia peradilan berjalan selama ini. Misalnya, KUHP dipelesetkan menjadi Kasih Uang Habis Perkara. Selain itu, tradisi atur mengatur juga menggunakan bahasa sandi. Di kantor-

kantor jika orang daerah yang akan mengurus sesuatu menyebut dari SUMUT, maka akan segera dilayani. Ternyata istilah SUMUT adalah perpanjangan dari kalimat : Semua Urusan Melalui Uang Tunai. Fenomena seperti ini menggambarkan betapa bobroknnya sesungguhnya mental birokrasi di Indonesia ini. Perundang-undangan dan peraturan sudah dibuat sedemikian rupa, akan tetapi tidak dijalankan dengan baik. Peraturan itu akan justru menjadi tidak bermakna apa-apa di tengah-tengah masyarakat, jika mental para penegak hukum dan undang-undang itu bobrok. Sekalipun telah disusun undang-undang dan peraturan jika antara pihak yang diatur bekerjasama dengan yang mengatur, apalagi penyimpangan itu sesungguhnya diback up oleh penegak hukum, maka rusaklah tatanan masyarakatnya. Dengan sedikit saja pemerintah mengambil langkah-langkah tegas, menegakkan hukum di tengah masyarakat, maka setiap hari akan terjadi peristiwa penangkapan. Sebab penyimpangan seperti sudah merata terjadi di mana-mana, sudah tidak pandang dari lapisan mana saja. Penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat sudah berasal dari berbagai level, mulai kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, pejabat Bank dan bahkan dari unsur polisi maupun lembaga peradilan.

Penyimpangan terhadap undang-undang, peraturan, dan ketentuan lain yang dibuat oleh pemerintah, akhir-akhir ini dianggap biasa. Anehnya, semua orang melakukannya. Jika terdapat sebagian kecil yang tidak melakukan pelanggaran justru dianggap aneh. Orang jujur dianggap telah ketinggalan zaman. Oleh karena itu jika gerakan pemberantasan korupsi dilakukan terus dan semakin diperkokoh, maka bisa jadi tidak seorang pun di tanah air ini yang tersisa, tidak masuk penjara. Lembaga peradilan akan semakin sibuk dan penjara akan semakin sesak dihuni oleh para koruptor dan tindakan penyimpangan terhadap peraturan dan perundang-undangan.

Fenomena ini jika dicermati secara saksama, maka akan diperoleh pemahaman bahwa, sekalipun perundang-undangan dan peraturan itu diperlukan dalam tatanan kehidupan masyarakat, akan tetapi jika tidak disempurnakan dengan perangkat untuk menegakkan peraturan dan perundang-undangan itu, maka akan justru memiliki kekuatan merusak mental masyarakat yang amat dahsyat. Penyakit munafik akan lahir dari kondisi seperti ini. Seorang tampak alim dan disiplin, dan dengan begitu mereka dihormati serta ditakuti oleh masyarakat, ternyata menyimpan watak merusak masyarakat. Mereka yang tampak allim itu sendiri yang justru, mengambil untung dari adanya undang-undang dan peraturan itu. Penegak hukum pun juga harus diperkokoh, tidak saja dibekali dengan alat-alat teknologi, melainkan juga mental dan watak yang benar. Dalam sejarahnya memang dalam setiap zaman selalu terdapat para penegak hukum dan keadilan --- polisi, hakim, jaksa, yang adil tetapi sebaliknya, ada pula yang tidak adil. Sejarah kehidupan umat manusia memang seperti itu. Karena itu harus ada mekanisme, agar lahir penegak hukum dan keadilan yang jujur dan adil. Jika di tengah masyarakat sudah tidak ada lagi lembaga yang dipercaya untuk mendapatkan keadilan, maka akan terjadi kerusuhan yang semakin menjadi-jadi.

Tetapi memang sesungguhnya, hukum dan peradilan bukanlah satu-satunya instrumen untuk menata dan membangun masyarakat yang adil dan damai. Nilai-nilai agama yang kokoh, --- keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, sesungguhnya justru merupakan instrumen yang lebih tepat untuk menata kehidupan masyarakat. Agama bukan saja memperhatikan perbuatan lahir, melainkan mengolah wilayah kehidupan manusia yang paling dalam, yaitu hati. Islam memberikan pedoman, misalnya, bahwa segala sesuatu harus dimulai dari niat ikhlas mengabdikan pada Allah swt. Semua perbuatan harus dilakukan secara benar karena dikerjakan oleh ahlinya. Dalam Islam dikenal konsep amal sholeh. Penganut Islam diajarkan bahwa untuk meraih segala

sesuatu, kita selalu dihadapkan oleh banyak pilihan. Maka tatkala kita harus memilih, maka harus memilih yang terbaik dan berkualitas. Konsep ini disebut ikhsan. Islam mengajarkan bahwa dalam mengarungi kehidupan seseorang harus selalu berpegang pada orientasi keimanan, keselamatan, kualitas terbaik, budi luhur dan juga harus selalu mengambil pilihan yang terbaik --  
- iman, islam, amal sholeh, akhlakul karimah dan ikhsan. Dan semua itu bisa dibangun melalui pendidikan Islam yang berkualitas. Pendidikan Islam seharusnya diyakini sebagai instrumen yang tangguh dalam membangun kehidupan masyarakat yang penuh kedamaian, keadilan, kejujuran dan akhirnya meraih kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Dan jika pendidikan Islam berhasil, maka lembaga peradilan -----polisi, jaksa, hakim tidak sesibuk sekarang ini. Allahu a'lam